Jurnal Penelitian Hukum De Jure adalah majalah hukum triwulan (Maret, Juni, September dan Desember) yang diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI bekerjasama dengan **IKATAN PENELITI HUKUM INDONESIA (IPHI)**, bertujuan sebagai wadah dan media komunikasi, serta sarana untuk mempublikasikan aneka permasalahan hukum yang aktual dan terkini bagi para peneliti hukum Indonesia khususnya serta kalangan masyarakat dan pemerhati hukum pada umumnya.

Pembina dan Penanggung Jawab

Y. Ambeg Paramarta, S.H., M.Si

(Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia)

Pemimpin Umum

Marulak Pardede, S.H., M.H., APU

(Ketua Ikatan Peneliti Hukum Indonesia)

Wakil Pemimpin Umum

Yayah Mariani, S.H., M.H.

(Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Peneliti Hukum dan Hak Asasi Manusia)

Dr. Agus Anwar, S.H., M.H.

(Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum)

Pemimpin Redaksi

Akhyar Ari Gayo, S.H., M.H., APU. (Hukum Islam)

Anggota Dewan Redaksi

Dr. Ahmad Ubbe, S.H., M.H., APU. (Hukum Adat)

Mosgan Situmorang, S.H., M.H. (Hukum Bisnis)

Syprianus Aristieus, S.H., M.H. (Hukum Perusahaan)

Nevey Farida Ariani, S.H., M.H. (Hukum Pidana)

Eko Noer Kristiyanto, S.H., M.H. (Hukum Tata Negara)

Muhaimin, S.H. (Hukum Islam)

Redaksi Pelaksana

Yatun, S.Sos

Sekretaris

M. Virsyah Jayadilaga, S.Si., M.P

Asmadi, S.H.

Tata Usaha

Dra. Evi Djuniarti, M.H.

Galuh Hadiningrum, S.H.

Suwartono

Teknologi Informasi dan Desain Layout

Risma Sari, S.Kom., M.Si (Teknologi Informasi)

Machyudhie, S.T. (Teknologi Informasi)

Saefullah S.ST., M.Si. (Teknologi Informasi)

Agus Priyatna, S.Kom. (Desain Layout)

Teddy Suryotejo (Desain Layout)

Mitra Bestari

Prof. DR. Rianto Adi, S.H., M.A (Pakar Hukum Perdata dan Adat)

Prof.Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H. (Pakar Hukum Pertanian dan Humaniter)

Dr. Yunus Husein, S.H., M.H. (Pakar Hukum Perbankan)

Dr. Dra. Farhana, S.H., M.H., M.Pd. (Pakar Hukum Pidana dan Gender)

Dr. Hadi Supratikta, M.M. (Pakar Otonomi Daerah dan Hukum Pemerintahan)

R. Herlambang Perdana Wiratraman, S.H., M.A., Ph.D.

(Pakar Hukum Tata Negara dan Budaya Hukum)

Alamat Redaksi

Gedung Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia

Jalan HR. Rasuna Said Kav. 4-5, Kuningan, Jakarta Selatan

Telepon (021) 2525015, Faksimili (021) 2526438

Email

jurnaldejure@yahoo.com

ejournaldejure@gmail.com

Percetakan

PT Pohon Cahaya

Jalan Gelong Baru Raya 18 Jakarta Barat 11440

Telpon (021) 5600111, Faksimili (021) 5670340

Redaksi menerima naskah karya asli yang aktual dalam bidang hukum berupa hasil penelitian dari berbagai kalangan, seperti: peneliti hukum, praktisi dan teoritisi, serta berbagai kalangan lainnya. Tulisan-tulisan yang dimuat merupakan pendapat pribadi penulisnya, bukan pendapat redaksi.

Redaksi berhak menolak, menyingkat naskah tulisan sepanjang tidak mengubah isinya. Naskah tulisan dapat dikirim ke alamat redaksi, maksimum 30 halaman A4, diketik spasi rangkap dikirim melalui Email: jurnaldejure@yahoo.com atau melalui aplikasi *Open Journal System* (OJS) pada URL/website: ejournal.balitbangham.go.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

Halaman

ADVERTORIAL

Peranan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam

Pemberantasan Korupsi Di Negara Demokrasi

(Role of The Attorney General of Indonesia in Eradicating

Corruption in State Democracy) 15 - 25

Suharyo

ADVERTORIAL

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat-Nya, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* di Tahun 2016 kembali akan hadir dihadapan para pembaca. Di Tahun 2016 ini, penerbitan *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* bertepatan dengan penyatuan para fungsional peneliti hukum yang berada di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Pusat Kebijakan dan Pengembang Sekretariat Jenderal dan Badan Penelitian dan Pengembangan HAM dijadikan dibawah satu Badan yaitu Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia.

Sehubungan dengan penyatuan para fungsional peneliti hukum di BADANLITBANGKUMHAM tersebut, diiringi pula dengan dijalinnya kerjasama antar IKATAN PENELITI HUKUM INDONESIA dan Pusat Dokumentasi dan Informasi BALITBANGKUMHAM dalam menerbitkan dan mempublikasikan *Jurnal Penelitian Hukum De Jure di Tahun 2016*.

Pembaca setia *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, dalam Volume 16 Nomor 1, Maret 2016 ini redaksi memuat beberapa tulisan dari penulis yang berprofesi sebagai peneliti instansi pemerintah, akademisi dan para perancang peraturan perundang-undangan yang berada di daerah.

Diantara tulisan tersebut yaitu, Kebijakan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai (Djbc) Dalam Bidang Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (Kite). Salah satu devisa negara yaitu berasal dari Ekspor jika beberapa kemudahan itu bisa dilakukan maka pemerintah telah membantu masyarakat dalam bidang ekspor yang dapat menambah eksistensi dari negara terhadap pendapatan yang berasal dari ekspor termasuk Implikasi Hukum Pemberian Kredit terhadap masyarakat khususnya kelas menengah ke bawah yang membutuhkan mekanisme pemberian kredit untuk menunjang produktifitas dalam ekspor.

Oleh karena itu berbagai upaya termasuk aliran dana baik yang berasal dari hasil ekspor maupun usaha lain yang menguntungkan masyarakat bangsa dan negara secara benar dan wajar seta bukan merupakan unsur dari tindak pidana pencucian uang, namun apabila aliran dana itu jika patut diduga sebagai tindak kejahatan maka Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai upaya percepatan Penarikan aset Koruptor segera melaksanakan tugas berdasarkan undang-undang untuk merampas aset tersebut yang berasal dari hasil kejahatan dan Peranan Kejaksaan RI dalam Pemberantasan Korupsi Di Negara Demokrasi menjadi pilar dalam penyelesaian permasalahan korupsi di Indonesia yang tak kunjung memberikan harapan baru bagi pemerintahan berupaya dalam pemberantasan korupsi.

Disamping itu, juga memuat tulisan berkaitan dengan Eksistensi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, Kebijakan Pemerintah Dalam Aspek Perizinan di Bidang Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara pada Era Otonomi Daerah, Menyoal Ketentuan Usul Pindah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Starategi Pengembangan Budaya Hukum.

Semoga dengan penerbitan beberapa tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam rangka memperkaya pengetahuan khususnya pengetahuan di bidang hukum

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Haksasi Manusia dengan Ikatan Peneliti Hukum Indonesia atas terjalinnya kerjasama penerbitan dan publikasi jurnal Penelitian Hukum De Jure. Dan ucapan terima kasih kepada Ibu Prof.DR. Jeane Neltje Saly, S.H.,MH., DR.Dra. Farhana, S.H.,M.H., Bapak DR. Yunus Husin, S.H.,LL.M., DR. Herlambang, S.H., DR. Hadi Supraptika, yang telah bersedia menjadi Mitra Bestari dalam penerbitan ini. Selamat membaca.

Jakarta, Maret 2016

Redaksi

**PERANAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI NEGARA DEMOKRASI**
(Role of The Attorney General of Indonesia in Eradicating Corruption in State Democracy)

Suharyo

Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM KUMHAM RI

Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan

Email : massuharyo@y.mail.com

Tulisan diterima 30-1-2016, Revisi 20-3-2016, Disetujui diterbitkan 28-3-2016

ABSTRACT

The Attorney General of Indonesia plays a strategic position in corruption eradication. Since Indonesia Independent Day on 17 August 1945 until now, the attorney general keeps eradicate the corruption. As one of the elements of criminal justice system of the democracy state refers to the Act No.16/2004 on the Attorney General of Republic of Indonesia, and also a concern with the Act No.8/1981 on the Criminal Code (KUHP). Corruption eradication is ruled and stipulated on the Act No.31/1999 on Corruption Eradication Jo the Act No.20/2001, and supported the Act No.8/2010 on the Criminal Act of Money Laundering . Questions of this research were what obstacles of corruption eradication in attorneys and how to make it effective? It was a normative-juridical method. It was an impression that the Attorney General has no dare to enforce the law for the elite politician, local officials (governors, majors) because of their strong relationship with. This phenomenon triggered scholars to do long march and protest to the Attorney General to be consistent and responsive in corruption eradication. Good governance and bureaucracy reform had no big impact, the meaning of "Tri Atmaka" and "Tri Karma Adhyaksa" had truly not been absorbed and practiced, yet.

Keywords: *The Attorney General of Indonesia in eradicating corruption*

ABSTRAK

Kejaksaan Republik Indonesia memegang posisi sangat strategis dalam pemberantasan korupsi. Sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai sekarang, Kejaksaan Republik Indonesia terus menerus melakukan pemberantasan korupsi. Sebagai salah satu unsur dari sistem peradilan pidana (Criminal Justice System) di dalam negara demokrasi Kejaksaan RI mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI, dan juga memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Khusus untuk pemberantasan korupsi, diatur melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi no Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan ditunjang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah kendala yang melekat jajaran Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi, serta Bagaimana mengefektifkan Kejaksaan RI dalam pemberantasan korupsi. Metode yang dipakai adalah yuridis normatif. Terdapat kesan, Kejaksaan RI sangat tumpul pada pelaku dari elit politik, dan pejabat daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) yang mempunyai koneksi politik yang kuat. Sehingga tidaklah mengherankan, apabila di berbagai daerah, muncul aksi-aksi unjuk rasa dari kalangan mahasiswa yang menuntut Kejaksaan RI agar konsisten dan responsif dalam pemberantasan korupsi. Good Governance dan reformasi birokrasi, hanya berpengaruh positif, secara minimal. Makna Tri Atmaka, serta Tri Karma Adhyaksa, kurang diresapi dan kurang diamalkan secara mendalam.

Kata Kunci: Kejaksaan RI dalam pemberantasan korupsi

PENDAHULUAN

Kejaksaan Republik Indonesia (RI) sebagai salah satu unsur di dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system), juga mempunyai tugas dan wewenang di bidang perdata dan tata usaha negara, serta menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum. Namun dalam dinamika perkembangan penegakan hukum di dalam negara demokrasi, yang selalu disorot tajam oleh warga masyarakat luas tidak lain dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Peranan Kejaksaan RI sebagai salah satu institusi penegakan hukum lahir sejak Kemerdekaan Republik Indonesia melalui Proklamasi 17 Agustus 1945, yang kemudian membentuk Undang-undang Dasar 1945. Walaupun tetap hanya tersirat dalam pasal 24 ayat (3) yang berbunyi “badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang”. Secara konstitusional dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat), bukan negara kekuasaan (machtsstaat). Menurut Frans Magnis Suseno (2001 : 295) menegaskan kekuasaan negara antara lain Kejaksaan harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Hukum menjadi landasan segenap tindakan negara, dan hukum itu sendiri harus benar dan adil.

Marwan Effendi (2005 : 53), menegaskan Eksistensi Kejaksaan RI dalam perspektif konsep rechtsstaat, konsep the rule of law, dan konsep Negara Hukum Indonesia hendaknya diwujudkan melalui konsep pembagian kekuasaan dalam penegakan hukum di negara Republik Indonesia. Kehadiran Kejaksaan RI dalam dunia peradilan adalah,

pertama, sebagai upaya preventif, membatasi, mengurangi atau mencegah kekuasaan pemerintah atau administrasi negara (konsep rechtsstaat) yang diduga sewenang-wenang, yang dapat merugikan, baik rakyat maupun pemerintah sendiri, bahkan supaya tidak terjadi Kolusi, Korupsi dan Nepotisme,

kedua, Kejaksaan RI seharusnya ditempatkan pada kedudukan dan fungsi mandiri dan independen untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam penegakan hukum agar terwujud peradilan yang adil, mandiri, dan independen pula (konsep the rule of law);

ketiga, menjaga keserasian hubungan hak dan kewajiban antara pemerintah dan rakyat melalui tugas penuntutan (penegakan hukum) dalam proses peradilan (konsep Negara Hukum Indonesia).

Di dalam negara yang berdasarkan pada hukum, Kejaksaan RI sejak kelahiran negara sampai dengan sekarang terus menjalankan tugas pokok, fungsi, dan wewenangnya untuk menegakkan keadilan, kepastian hukum, serta menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada masa pemerintahan Orde Baru dibawah Presiden Soeharto, Kejaksaan menjalankan kewenangan yang sangat strategis dalam penegakan hukum. Model dan strategi penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan RI adalah melakukan penuntutan terhadap tertuduh pelaku subversi pada pihak-pihak yang dianggap mengancam stabilitas nasional. Hal ini sesuai dan selaras dengan strategi nasional demi terciptanya stabilitas nasional, stabilitas politik, dan stabilitas ekonomi.

Performance dan sikap tindak Kejaksaan RI yang demikian, juga berkenaan produk peraturan perUndang-Undangan yang ada, masih bernuansa represif serta tidak mengandung perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Kalaupun ada, seperti Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang menegaskan berbagai perlindungan HAM justru selalu disimpangi untuk kepentingan penguasa. Dan dari berbagai kasus korupsi yang terjadi selama pemerintahan Orde Baru, hanya kasus korupsi Let.Jen.Pol. Drs. Siswadi, SH dan kasus Kadolog Kalimantan Timur Budiadji, yang bisa diproses sampai ke Pengadilan. Untuk kasus korupsi dan kejahatan serius lainnya tidak menjadi prioritas. Kepentingan politik menguasai sampai kental. Sehingga selain yang dianggap menentang dan menggerogoti NKRI, dapat dipastikan akan diproses sampai ke persidangan.

Era Reformasi, telah mengawali pemerintahan demokratis dengan pernyataan berhenti Presiden Soeharto yang kemudian digantikan oleh Wakil Presiden BJ Habibie. Tampilnya Preside BJ Habibie telah merubah dari suatu sistem yang otoriter, represif dan mewabah korupsi, menjadi awal pemerintahan yang demokratis. Ciri khas negara demokratis, berorientasi pada kekuasaan rakyat, kebebasan berekspresi, perlindungan HAM, supremasi hukum, menjadikan Kejaksaan RI dituntut oleh warga masyarakat luas untuk

proaktif terhadap mewabahnya korupsi. Fenomena korupsi sangat mencolok dan sudah menjadi rahasia umum. Utamanya para pemerhati hukum dan HAM sangat bersepakat bahwa mantan Presiden Soeharto adalah kasus korupsi terbesar dalam sejarah korupsi di Indonesia.

Kasus korupsi mantan Presiden Soeharto menjadi sangat menarik perhatian bagi seluruh rakyat Indonesia. Disamping itu, juga menarik perhatian dan minat masyarakat internasional, terhadap para kepala negara/kepala pemerintahan yang diturunkan di tengah masa jabatannya, yang pada tuduhan utamanya adalah korupsi. Tarik menarik antara dukungan secara terselubung terhadap mantan Presiden Soeharto dan tuntutan rakyat agar mantan Presiden Soeharto diadili, berlangsung secara masif. Namun tetap terkendali dalam artian rakyat terus menuntut, selalu mematuhi ketentuan tentang unjuk rasa. Tragisnya Jaksa Agung A. Soedjono Atmonegoro yang menegaskan akan memproses korupsi mantan Presiden Soeharto hanya menjabat selama 3 (tiga) bulan. (Marwan Effendi, 2005 : 73).

Dari pemerintahan Presiden BJ Habibie, yang kemudian digantikan oleh Presiden Abdurrahman Wahid, kemudian dilanjutkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri, pemberantasan korupsi yang digelar oleh Kejaksaan RI tidak menonjol. Situasi politik yang bergolak dan keamanan nasional yang diwarnai konflik kekerasan bersenjata di Aceh, Maluku, dan Poso, serta sisa-sisa konflik di Kalimantan Tengah. Walaupun, pada waktu itu, dalam pemberantasan tindak pidana korupsi telah diundangkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan pada tahun 2002 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baru setelah tampilnya pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono, Kejaksaan berupaya dalam pemberantasan korupsi. Melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia selalu terkendala dan berprestasi minimal dalam pemberantasan korupsi, walaupun telah diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Korupsi di Indonesia cenderung menjadi sasaran penindakan dari KPK.

Dengan tampilnya pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dalam programnya diantaranya akan meneruskan dan meningkatkan melakukan pemberantasan korupsi, telah direspon dengan cepat oleh Kejaksaan Agung, diantaranya dengan membentuk Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Agung (Satgasus P3TPK). Pembentukan Satgasus serupa juga dilangsungkan di lingkungan Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia. Jaksa Agung H.M. Prasetyo pernah berjanji, Satgasus akan dievaluasi saat berumur 3 bulan. (Kompas, Kamis 13 Maret 2015). Seluruh rakyat Indonesia yang sudah tidak tahan dengan fenomena korupsi yang merajalela, seolah-olah tidak terkendali, dalam waktu yang tidak terlampau lama selalu menunggu, mengingatkan, dan menuntut kinerja yang serius dan konsisten dari Kejaksaan Agung dalam memberantas korupsi.

Kompleksitas pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan RI, pada era otonomi daerah yang bercirikan desentralisasi, menjadikan korupsi yang pada masa lalu terpusat pada pusaran pemerintahan pusat, kemudian juga berkembang pesat di daerah. Kekesalan warga masyarakat terhadap fenomena korupsi di daerah, ternyata kurang direspon melalui penyidikan dan penuntutan oleh Kejaksaan RI.

Kinerja Kejaksaan RI yang sangat disorot tajam dalam pemberantasan korupsi, seolah-olah mengabaikan korupsi yang menjadi epidemi di daerah. Walaupun korupsi telah semakin diyakini menjadi budaya penyimpangan yang sangat merugikan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang menjadi persoalan adalah apakah kendala yang melekat jajaran Kejaksaan RI dalam pemberantasan korupsi; bagaimanakah mengefektifkan Kejaksaan RI dalam pemberantasan korupsi.

TUJUAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan Peranan Kejaksaan RI dalam Pemberantasan Korupsi di Negara Demokrasi yang juga merupakan suatu tindakan hukum. Sedangkan kegunaan dari penelitian ini diharapkan menjadi masukan khususnya kepada jajaran Kejaksaan RI agar mampu dan konsisten dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

KERANGKA TEORI

Teori yang digunakan adalah teori penegakan hukum, oleh Soerjono Soekanto (1982 : 90) yang menyatakan “keberhasilan atau efektivitas penegakan hukum tergantung pada :

1. Baik buruknya hukum yang berlaku;
2. Baik buruknya mentalitas penegak hukum;
3. Fasilitas yang cukup atau kurang;
4. Taraf kesadaran dan kepatuhan hukum warga masyarakat”.

Kompleksitas penegakan hukum terhadap korupsi, juga beranjak dari modus operandi dan tehnik-tehnik para pelaku serta jenis korupsi yang dilakukan secara berkelompok. Adapun definisi korupsi menurut Guy Benveniste (1989 : 166-167) adalah: *Discretionary Corruption*, korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah; bukankah praktek-praktek yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.

Illegal corruption, seperti terungkap dari namanya, adalah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa ataupun maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu.

Mercenary corruption adalah satu jenis tindakan korupsi yang dimaksud untuk kegiatan pemberian uang sogok dan uang semir.

Ideological corruption atau korupsi ideologis adalah jenis korupsi baik yang bersifat ilegal maupun diskresionari yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan-tujuan kelompok. Episode Watergate adalah suatu skandal yang dilakukan oleh sejumlah individu yang lebih menimbulkan komitmen ideologi mereka kepada Presiden Nixon ketimbang kepada Undang-Undang dan hukum.

Adapun tentang negara hukum yang demokratis, menurut Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim adalah (1982 : 226-227) :

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan;
2. Peradilan yang bebas dari pengaruh sesuatu atau kekuatan lain dan tidak memihak;
3. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.

Sedangkan kerangka konsepsional yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI, diantaranya pada pasal 30 ayat (1). Di bidang pidana, kejaksaan RI mempunyai tugas dan wewenang :

1. melakukan penuntutan;
2. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan putusan lepas bersyarat;
4. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
5. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Sejalan dengan hal itu, juga harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, antara lain pada :

Pasal 25. Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi didahulukan dari pada perkara lain guna penyelesaian secepatnya.

Pasal 26. Putusan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang.

Pasal 27. Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan dibawah koordinasi Jaksa Agung.

METODE

Untuk menjawab dan menjelaskan permasalahan di atas metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu melalui pengumpulan data kepustakaan, yang berasal dari literatur tentang pemberantasan korupsi, peraturan perundang-undangan, majalah dan surat kabar yang relevan

dengan judul. Pendekatan normatif sangat relevan guna menganalisis literatur, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan tersebut dalam menganalisis Peranan Kejaksaan RI dalam Pemberantasan Korupsi di Negara Demokrasi.

PEMBAHASAN

Periode kedua pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dalam program kerjanya juga terdapat pemberantasan korupsi yang semakin meluas. Eksistensi KPK yang pada masa-masa awal seringkali disorot tajam oleh kelompok oposisi (PDI Perjuangan), sebagai pilih bulu dan memihak ternyata dalam beberapa tahun terakhir ini menunjukkan konsistensi yang sangat kuat untuk memerangi korupsi. Setelah kasus Hambalang, impor daging sapi, dan SKK Migas, KPK melalui Operasi Tangkap Tangan, berhasil menangkap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. Rentetan kasus Akil Mochtar, juga menysar Gubernur Banten Atut Chosiyah. Pada saat KPK dengan sangat gemilang dan menjadi pujian seluruh rakyat Indonesia, ternyata Kejaksaan RI belum menampakkan prestasi yang cemerlang dalam pemberantasan korupsi.

Sebagai rahasia umum, korupsi telah menjadi bagian dari perilaku birokrasi, elit politik baik yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat di DPR maupun DPRD, lembaga penegakan hukum, kalangan pengusaha, serta dilingkungan pendidikan. Era Otonomi Daerah, sejak dikeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Otonomi Daerah jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, justru menjadi ajang meluasnya korupsi di daerah yang melibatkan anggota DPRD, sampai dengan Kepala Daerah mulai Bupati atau Walikota sampai dengan Gubernur.

Melalui pemberitaan di berbagai mass media, terutama media elektronik, dengan jelas dan terbuka pada setiap saat diberitakan kasus-kasus korupsi di seluruh daerah Indonesia. Para tersangka baik yang disebutkan namanya secara lengkap maupun memakai inisial menjadi santapan publik yang tiada henti. Sikap masyarakat terhadap korupsi yang ditayangkan di media elektronik, biasanya sangat antusias. Yang pasti menjadi lebih serius, jika terdapat kasus korupsi yang tertangkap tangan oleh KPK yang kemudian pemberitaannya diulang-ulang selama berminggu-minggu.

Korupsi yang secara konstan tinggi mengindikasikan bahwa krisis mental budaya yang dialami Bangsa Indonesia benar-benar parah, kalau tidak dapat dikatakan berada di titik nadir. Menurut Tb Ronny Rahman Nitibaskara (2009 : 81), pada saat ini memang agak sulit melacak akar krisis mental budaya itu. Salah satu sebabnya, banyak unsur yang berkelindan, saling mempengaruhi, sehingga rancau dan sulit menentukan faktor mana yang paling determinan menyumbang krisis itu. Tetapi dalam konteks budaya dalam transisi, krisis tersebut banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor negatif yang kami sebut sebagai perangkap penyimpangan dan kejahatan.

Walaupun korupsi sebagai fenomena penyimpangan di seluruh dunia, seolah-olah tidak dapat dihabiskan melalui penegakan hukum. Kejaksaan RI sudah barang tentu tidak harus berkecil hati apalagi melakukan pembiaran. Pendekatan hukum pidana sebagai ultimum remedium, mutlak dilaksanakan sepanjang Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap ada. Menurut Muladi (Supanto, 2009 : 7), Hukum Pidana dan penagakannya merupakan bagian dari politik kriminal (*Criminal Policy*), politik kriminal merupakan bagian dari politik penegakan hukum (*law enforcement policy*) yang mencakup pula penegakan hukum perdata dan penegakan hukum administrasi. Politik penegakan hukum merupakan bagian politik sosial (*social policy*) yang merupakan usaha setiap masyarakat dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.

Tanpa berusaha memihak, terlihat bahwa Kejaksaan RI kurang semangat dalam memerangi korupsi. Memang pada saat Jaksa Agung dijabat oleh Abdul Rahman Saleh, SH periode 2004-2007 dengan serius melaksanakan penegakan hukum kasus korupsi. Dalam berbagai kesempatan, Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh, SH (2008 : 303), menyatakan kepada para Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri untuk bersungguh-sungguh memproses setiap dugaan korupsi di wilayah kerja masing-masing. Bahkan menetapkan target minimal sebagai indikator kinerja : 1 kasus korupsi dalam satu tahun untuk cabang Kejaksaan Negeri, 3 kasus korupsi dalam setahun untuk Kejaksaan Negeri, dan 5 kasus korupsi dalam satu tahun untuk Kejaksaan Tinggi.

Indeks persepsi korupsi 2014 seperti diberitakan oleh Koran Sindo, Rabu 17 Desember 2014 yang dikeluarkan organisasi Transparansi

Internasional menempatkan Indonesia pada peringkat 107 (skor 34) dari 175 negara. Peringkat ini lebih baik dibandingkan tahun lalu. Meski demikian, peringkat ini tak berarti praktik korupsi telah berkurang. Lembaga paling korup Indonesia ialah : Polisi 4,3; Parlemen/DPR : 4,5; Peradilan: 4,4; Partai Politik: 4,3; Pelayanan Publik: 4,0; sektor bisnis : 3,4; pelayanan kesehatan: 3,3; pendidikan: 3,2; Militer 3,1; LSM : 2,8; lembaga agama: 2,7; dan Media; 2,4. Adapun penanganan perkara Tipikor Kejaksaan Tahun 2013 :

Jumlah penyelidikan	: 1696 kasus;
Jumlah penyidikan	: 1646 kasus
Jumlah penuntutan	:
1. Asal Kejaksaan	: 1243 kasus
2. Asal Polri	: 770 kasus
Penyelamatan uang	
negara	: Rp.403.102.000.215,- USD 500.000,-
(Sampai November)	:
Jumlah penyelidikan	: 1538 kasus
Jumlah penyidikan	: 1365 kasus
Jumlah penuntutan	: 1023 kasus
Penyelamatan uang	
negara	: Rp.274.844.804.686,- USD 8.100.000,-

Betapapun keseriusan Kejaksaan RI dalam mengeliminir korupsi dari bumi Indonesia, sudah barang tentu tidak boleh bertindak secara serampangan, yang justru bertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan supremasi hukum. Kecuali memang setiap pemerintahan hasil dari kudeta baik oleh militer maupun bisa juga kudeta sipil. Di beberapa negara totaliter, militer dan Kejaksaan langsung menangkap, menahan dan memproses pihak-pihak yang dianggap melakukan korupsi. Sebagai fenomena umum setiap munculnya kudeta di banyak negara berkembang dan totaliter, yang langsung ditangkap dan dihukum oleh pemerintahan baru adalah pengganggu keamanan dan ketertiban umum, serta para koruptor.

Dalam penegakan hukum, menurut Marwan Effendi (2012: 5), Kejaksaan RI sebagai salah satu institusi penegak hukum (law enforcement institution) di Indonesia memiliki fungsi sangat sentral sebagai pengendali proses perkara (Dominus litis) yang menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan sebagai terdakwa dan

diajukan ke pengadilan, berdasarkan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang dari hasil penyelidikan. Selain itu Kejaksaan melakukan penyidikan sendiri dalam tindak pidana tertentu dan juga sebagai satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*).

Adapun Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis, setiap tindakan Kejaksaan RI untuk memproses pelaku-pelaku tindak pidana korupsi, harus memperhatikan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan umum butir 3 c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Penerapan asas ini tidak lain adalah untuk melindungi kepentingan hukum dan hak-hak tersangka dari kesewenang-wenangan kekuasaan para aparat penegak hukum, serta memberikan perlindungan hak asasi manusia (HAM).

ANALISIS

Sebagai institusi dibidang penyelidikan tindak pidana tertentu dan penuntutan, Kejaksaan terkendala dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Menurut Indriyanto Seno Adjie (2006 : 44-45), dari pendekatan demokratis Kejaksaan mutlak bersikap tindak secara independen yang menjunjung supremasi hukum. Kejaksaan merupakan salah satu aparat penegak hukum yang een en ondeelbaar dalam struktur ketatanegaraan. Ia masuk dalam komponen penegak hukum independen yang melaksanakan sistem peradilan pidana bersama-sama dengan badan kekuasaan kehakiman.

Dalam perspektif sistim ketatanegaraan Indonesia, menurut Marwan Effendi (2005 : 159), Kejaksaan RI tetap dibawah kekuasaan eksekutif, Kejaksaan RI dalam kedudukan sekarang tidak mempunyai kemandirian dalam penuntutan dan penegakan hukum karena disamping Undang-Undang menyatakan bahwa Kejaksaan dalah lembaga pemerintah, juga merupakan komponen POLKAM yang tidak berbeda dari Kejaksaan pada masa pendudukan balatentara Jepang dibawah Ciambu, urusan keamanan Jepang. Agar institusi Kejaksaan lebih mumpuni (onafhankelijk) dalam penegakan hukum dan tidak terkesan harus dikembalikan sebagai alat negara penegak hukum dan lepas dari komponen POLKAM dalam Kabinet. Mereposisi institusi Kejaksaan RI antara

lain dilakukan melalui amandemen terhadap Undang-Undang yang ada atau menggantikannya dengan Undang-Undang baru. Sebagai suatu perbandingan, dapat dilihat bagaimana kemampuan (*volwaardigheid*) Jaksa Agung Janet Reno, yang juga adalah Secretary of Justice dalam Kabinet Clinton, yang membolehkan Penuntut Umum Independen Kenneth Star (yang juga adalah penyelidik White Water), untuk menyelidiki kasus perselingkuhan Clinton dengan Monica Levinsky, kemudian mengirim hasil investigasinya kepada House of Representative untuk di impach, namun akhirnya Senat menyatakan Clinton tidak bersalah dan tetap diperbolehkan memegang jabatannya.

Kendala yang menghadang dalam pemberantasan korupsi, juga beranjak dari dinamika institusi Kejaksaan RI. Warga masyarakat melalui berbagai lembaga swadaya masyarakat, serta pihak-pihak yang terkait dalam kasus-kasus korupsi menganggap bahwa Kejaksaan RI sangat tumpul ke atas, dan tajam ke bawah. Apalagi kalau terdapat kepentingan politik yang kuat, serta kekuatan politik yang dominan.

Kinerja Kejaksaan Agung dalam menangani kasus-kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah patut dipertanyakan. Betapa tidak, sejumlah kepala daerah yang sudah ditetapkan menjadi tersangka, malah dibebaskan sebelum maju ke persidangan. Tengok saja kasus korupsi yang melibatkan Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak. Kejaksaan Agung mengeluarkan surat perintah Penghentian Penyidikan (SP3), setelah hampir tiga tahun menyidik kasus dugaan kasus korupsi divestasi saham PT Kaltim Prima Cool. Pada tahun 2011 silam. Kejaksaan Agung juga menerbitkan SP3 kasus korupsi Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Arifin. Sebelumnya Rudy terjatuh dalam kasus dugaan korupsi pemberian uang santunan pembebasan tanah hak guna bangunan (HGB) eks Pabrik Kertas Martapura oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2002-2003. Setahun sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah juga mengeluarkan SP3 kasus dugaan korupsi mantan Walikota Semarang Sukawi Sutarip yang saat itu menjabat Ketua Partai Demokrat Jawa Tengah, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi APBD Kota Semarang tahun anggaran 2004 dalam pos dana komunikasi Rp.5 milyar. (Forum Keadilan Nomor 5 Tahun XVII / 21-27 Oktober 2013).

Untuk menghindari penahanan Kejaksaan, para tersangka korupsi, seringkali menggunakan alibi bahkan penipuan sedang menderita sakit, dan mempunyai surat keterangan dokter. Hal ini dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, pada Pasal 36 ayat (1) Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri.

(2) Izin secara tertulis untuk berobat atau menjalani perawatan di dalam negeri diberikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri setempat atas nama Jaksa Agung, sedangkan untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit di luar negeri hanya diberikan oleh Jaksa Agung.

(3) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), hanya diberikan atas dasar rekomendasi dokter, dan dalam hal diperlukannya perawatan di luar negeri rekomendasi tersebut dengan jelas menyatakan kebutuhan untuk itu yang dikaitkan dengan belum mencukupinya fasilitas perawatan tersebut di dalam negeri.

Melemahnya kinerja Kejaksaan RI, ternyata juga terjadi dalam pelaksanaan eksekusi terpidana korupsi, yang telah mempunyai putusan dan kekuatan hukum yang tetap. Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi yang terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Indonesian Legal Roundtable (ILR), dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Minggu 20 Oktober 2013 menyampaikan informasi "Sebanyak 43 terpidana kasus korupsi dari 37 kasus tak kunjung dieksekusi Kejaksaan Tinggi di sejumlah daerah, padahal putusannya sudah berkekuatan hukum tetap sejak tahun 2003 hingga pertengahan Oktober 2013. Pada Mei 2013, Koalisi pernah beraudiensi dengan Wakil Jaksa Agung Darmono untuk mendorong optimalisasi pemberantasan korupsi, terutama mengeksekusi perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Setelah pertemuan itu, Kejaksaan berhasil memidana 14 koruptor dari tujuh perkara korupsi. (Kompas, Senin 21 Oktober 2013).

Permasalahan penegakan hukum di Indonesia menurut Indriyanto Seno Adjie (2006: 373-374), tidaklah sekedar diamati dari sisi substansial per-Undang-Undangan saja, tetapi juga berkaitan dengan sistem, khususnya sistem hukum pidana karena korupsi itu kenyataannya telah merusak sistem (*destructured to the system*).

Dalam konteks yang komprehensif, tidak dapat dipungkiri bahwa korupsi merupakan White Collar Crime dengan perbuatan yang selalu mengalami dinamisasi modus operandinya dari segala sisi sehingga dikatakan sebagai *invincible crime* yang sangat sulit memperoleh prosedural pembuktiannya, karenanya seringkali memerlukan pendekatan sistem (*systemic approach*) terhadap pemberantasannya.

Sebagai penyidik dan sekaligus penuntut umum dalam kasus korupsi, menyebabkan jajaran Kejaksaan RI tidak steril dari godaan untuk melakukan pendekatan dan pemerasan untuk meminta imbalan dalam jumlah tertentu pada tersangka dan tertuduh. Warga masyarakat masih mengingat : Jaksa Urip Tri Gunawan yang ditangkap KPK karena korupsi. Demikian pula halnya Jaksa Cirus Sinaga yang terpaksa harus menjalani pemidanaan karena berkolaborasi dengan Gayus Tambunan. Namun begitu, dalam era demokrasi dan teknologi canggih di bidang informasi, dalam pembinaan karir di Kejaksaan RI, tidak mempublikasikan kinerja serta beberapa anggota Kejaksaan yang mendapat hukuman disiplin sampai dengan pemecatan.

Dalam penyidikan maupun penuntutan kejahatan korupsi, pihak penegak hukum harus bersikap hati-hati, profesional dan serius untuk menerapkan prinsip-prinsip dan etika hukum yang dapat dipertanggung jawabkan pada hukum serta kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada beberapa kasus, justru jajaran penegak hukum, terlibat atau menikmati hasil korupsi para pihak yang menjadi obyek penegakan hukum. Seperti halnya mantan kepala Kejaksaan Negeri Praya (Kejari) Praya Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat Subri, SH, dituntut 12 tahun penjara karena menerima suap dalam persidangan di Pengadilan tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mataram. Hal-hal yang memberatkan, karena sebagai jaksa, Sabri, SH, dituduh telah mencoreng institusi pemerintah, termasuk menghambat upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Terdakwa sebagai Kajari semestinya memberi contoh bukan malah sebaliknya melakukan perbuatan yang melanggar pidana. (Forum Keadilan Nomor 12 Tahun XVII / 14 – 20 Juli 2014).

Kejaksaan Agung masih memiliki piutang uang pengganti sebesar Rp 14,5 triliun. Sesuai laporan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2014, nilai ini merupakan gabungan tunggakan dari

perkaa tindak pidana korupsi serta perkara perdata dan tata usaha negara. Nilai piutang uang pengganti Kejaksaan tersebut naik dari tahun 2013 yang tercatat sebesar Rp 13,1 triliun. Pihak Kejaksaan mengakui pengembalian uang negara ini tidak mudah karena berbagai hal, antara lain minimnya anggaran, profesionalitas jaksa, dan ketersediaan aset pelaku. Harapannya memang setelah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap bisa langsung dieksekusi dan dikembalikan ke kas negara. Namun kenyataannya ada saja kendala di lapangan,”ungkap Direktur Upaya Hukum, Eksekusi, dan Eksaminasi pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Korupsi (Jampidsus) Ahmad Djainuri, di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (15/3) (Kompas, Rabu 16 Maret 2016)

Dukungan dan komitmen dalam membersihkan aparat penegak hukum agar kemudian menjadi contoh bagi masyarakat ditunjukkan oleh pemimpin Hongkong dan jajaran pemerintahannya. Berbeda dengan Indonesia, para penegak hukum justru kerap berurusan dengan hukum dan melakukan korupsi yang semestinya diberantas. Hal itu setidaknya terlihat dari Laporan Tahunan Kejaksaan periode 2011-2015. Terdapat sebanyak 701 jaksa dikenai sanksi oleh unit pengawasan Kejaksaan. Bahkan ada jaksa yang sampai dibawa ke meja hijau karena korupsi atau memeras. Untuk itu, kedatangan ICAC Hongkong kali ini pun menjadi angin segar bagi kejaksan dalam berbenah diri. (Kompas, Jumat 18 Maret 2016)

Penerapan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, terlihat belum begitu dioptimalkan dalam pemberantasan korupsi pada jajaran Kejaksaan RI di daerah. Hal ini menyebabkan pemberantasan korupsi di daerah belum menimbulkan efek jera yang menakutkan bagi para koruptor dan koleganya.

Sampai dengan pertengahan tahun 2015 yang lalu Warga masyarakat di daerah, utamanya mahasiswa dalam merespon kinerja Kejaksaan RI dalam pemberantasan korupsi, sungguh sangat perlu didukung. Yang biasa dilakukan mahasiswa, diawali dengan audiensi baik kepada kepala Kejaksaan Negeri maupun Kepala Kejaksaan Tinggi yang melaporkan secara lengkap korupsi di daerah itu. Namun setelah berganti tahun, dan ternyata respon Kejaksaan setempat pasif terhadap korupsi, pada akhirnya mahasiswa melakukan

unjuk rasa. Dan fenomena unjuk rasa tersebut dapat terjadi kericuhan.

Sebagai bagian dari struktur pemerintahan, Kejaksaan RI didorong untuk menyelenggarakan dan menegakkan pemerintahan yang baik (good governance). United National Development Programme (UNDP) merumuskan karakteristik pemerintahan yang baik, menurut Sadjijono (2010: 189-190), yaitu:

1. Partisipasi (*Participation*);
2. Penegakan Hukum (*Rule Of Law*);
3. Transparansi (*Transparency*);
4. Daya Tanggap (*Responsiveness*);
5. Konsensus (*Concensus*);
6. Keadilan (*Equality*);
7. Efektif dan Efisien;
8. Akuntabilitas (*Accountability*)
9. Visi strategis.

Di tengah semakin gencarnya tuntutan pemberantasan korupsi, Kejaksaan RI yang dalam penanganan korupsi justru disaingi KPK, harus cepat introspeksi. Hal itu untuk mencegah kehancuran perekonomian negara yang lebih meluas, sikap dan mental yang mengagungkan hedonisme, dan ditengah keprihatinan bangsa pada tersangka korupsi yang tidak merasa bersalah. Menurut Sidharta (2006 : 182-183), perlu melihat dan memperhatikan *Tri Atmaka* atau tiga sifat dan hakikat, yakni : tunggal, mandiri, dan mumpuni; serta *Tri Karma Adyaksa* yang berintikan sifat-sifat *Satya*, *Adhy*, dan *Wicaksana*. Namun dalam fenomena sekarang dalam beberapa aspek sering disimpangi.

Profesionalisme Jaksa dalam hal menghadapi dan membuat tuntutan terhadap pelaku korupsi, harus terus menerus ditingkatkan. Koruptor selalu mencari-cari celah hukum untuk dapat disimpangi untuk mendapatkan keuntungan dari para pihak yang mempunyai niat dan kesempatan dalam melakukan korupsi. Pada saat korupsi tersebut di proses di Pengadilan. Menurut M. Syamsudin (2012 : 183), dalam memeriksa perkara korupsi hakim tidak dapat berdiri sendiri. Hakim terikat pada surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang selalu mendakwa terdakwa dengan Pasal 2 atau Pasal 3 UUPTPK dengan berbagai variasinya. Pasal 2 dan Pasal 3 UUPTPK itu kadang-kadang ditempatkan pada posisi yang berlainan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat

dakwaan. Kedua pasal tersebut kadang-kadang yang satu kedudukannya menjadi dasar dakwaan Subsida terhadap yang lain, dan kadang-kadang yang satu didudukkan menjadi dasar dakwaan alternatif terhadap lainnya.

Cara berfikir dan bersikap tindak jalaran Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi, harus memberikan perlindungan terhadap masyarakat luas ataupun rakyat Indonesia yang menjadi korban akibat fenomena korupsi. Menurut Satya Deni Bagus Yukerawan, hal yang penting untuk dianalisis adalah keterkaitan gradasi kepentingan individual pelaku dengan kepentingan individual korban serta kepentingan sosial masyarakat dengan eksistensi asas legalitas. Sebagaimana telah dijelaskan dalam hal terjadinya “Crimina extra ordinaria”, asas legalitas hanya melakukan fungsi perlindungan terhadap kepentingan pelaku, tetapi sama sekali tidak melakukan fungsi perlindungan terhadap korban, baik korban individual dan masyarakat. Asas legalitas sama sekali tidak diorientasikan kepada kepentingan korban. Kepentingan korban dan atau kepentingan sosial dikorbankan demi kepentingan pelaku.

Sebagaimana sangat strategis dalam pemberantasan korupsi, jalaran Kejaksaan RI mutlak perlu sumber daya yang profesional, disiplin, taat asas, dan konsisten terhadap kepentingan bangsa dan negara. Sebagai kekhawatiran bersama, menurut Satjipto Rahardjo (2006 :27) manusia-manusia Indonesia yang baik-baik kurang memperoleh kesempatan untuk tampil sebagai pimpinan dan pengatur masyarakat. Guna memulihkan keterpurukan negeri dan bangsa kita kini, marilah kita bersatu mengangkat dan memunculkan orang-orang baik.

KESIMPULAN

Harus diakui bahwa Kejasaan RI telah berjasa dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun demikian keterbatasan, kesiapan dan semangat yang lebih serius dalam meminimalisir korupsi masih harus dipacu didukung serta pengawasan langsung oleh seluruh rakyat Indonesia.

Dengan reformasi birokrasi yang sudah lama dilaksanakan, Kejaksaan RI seharusnya dapat bermanfaat dalam pemberantasan korupsi. Dari aspek sumber daya manusia, Kejaksaan sudah sangat siap, dan profesional. Sebagai catatan khusus, mentalitas jalaran Kejaksaan RI harus

terus menerus dan dibangkitkan, karena memegang peranan tertinggi dalam memerangi korupsi di tengah kegagalan serta kegusaran masyarakat terhadap korupsi.

Seluruh rakyat Indonesia sangat berharap bahwa Kejaksaan RI dapat diandalkan dalam memerangi korupsi. Akibat korupsi telah dirasakan semakin menyakitkan oleh Bangsa Indonesia. Sikap dan tindak Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi harus mengoptimalkan perlindungan terhadap korban, yaitu seluruh rakyat Indonesia serta generasi mendatang. Di tengah kemiskinan yang menjadi fenomena umum sangatlah tepat agar jajaran Kejaksaan RI segera melakukan reformasi internal dan reformasi mental untuk memberantas korupsi.

Sebagai suatu saran konsistensi untuk mengefektifkan Kejaksaan RI dalam memberantas korupsi di Indonesia sudah menjadi keharusan yang tidak boleh ditunda-tunda lagi. Presiden sebagai atasan langsung dari Jaksa Agung harus selalu mengevaluasi kinerja setiap saat. Suara serta aspirasi masyarakat luas dalam negara demokrasi, untuk menuntut pemberantasan korupsi, adalah fenomena yang sangat positif. Budaya pengawasan dari internal Kejaksaan, harus ditumbuhkembangkan. Pembudayaan sanksi represif terhadap jajaran Kejaksaan RI yang berkolaborasi negatif dengan pelaku korupsi perlu diintensifkan. Disamping itu, sosial kontrol melalui media massa, merupakan strategi yang sangat ampuh sebagai upaya mempengaruhi dan membentuk opini masyarakat untuk serius melawan korupsi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Abdul Rahman Saleh, *Bukan Kampung Maling, Bukan Desa Ustadz. Memoar 930 hari di Puncak Gedung Bundar*. Penerbit Kompas Jakarta 2008
- Deni Setyo Bagus Yuherawan. *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana Sejarah Asas Legalitas dan gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana*. Penerbit Setara Pers, Malang 2014.
- Guy Benveniste. *Birokrasi*, Penerjemah Sahat Simorangkir. Penerbit PT Rajawali Pers, Jakarta, 1989.
- Indriyanto Seno Adjie, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana*, Penerbit CV Diadit Media, Jakarta, 2006
- Indriyanto Seno Adjie. *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum*. Penerbit Kompas Buku, Jakarta, 2009.
- Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI dan CV Sinar Bakti, Jakarta, 1983.
- Marwan Effendi. *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- _____, *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi & Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*, Penerbit Referensi, Jakarta, 2012
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit UI Pers, Jakarta 1982
- M. Syamsudin. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2012.
- Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Kompas Buku, Jakarta, 2006
- Supanto, *Kejahatan Ekonomi Global dan Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 2009

Sadjijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Penerbit Laksbang, Yogyakarta, 2010

Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, *Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan Teori Baru Dalam Kriminologi*, Penerbit YPKIK, Jakarta, 2009

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

C. Surat Kabar / Majalah

- Kompas, Senin 21 Oktober 2013
- Forum Keadilan Nomor 25 Tahun XXII/21-27 Oktober 2013
- Forum Keadilan Nomor 12 Tahun XII/14-20 Juli 2014.
- Koran Sindo, Rabu 17 Desember 2014.
- Kompas, 16 Maret 2016
- Kompas, 18 Maret 2016